

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pencemaran lingkungan telah menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, dalam kekhawatiran tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia mempunyai program dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara melakukan pemulihan kerusakan yang terjadi dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Pada akhir tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,47% dari target sebelumnya yaitu 68,96%. KLHK sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, namun semakin hari kasus pencemaran lingkungan juga masih terjadi di Indonesia.

Perusahaan pertambangan saat ini menjadi salah satu sektor yang sedang menjadi sorotan dari masyarakat melalui kinerja ekonomi, sosial maupun lingkungan. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan dan sosial mengingat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sumber utamanya adalah sumber daya alam yang dimana sumber daya alam memiliki dampak langsung yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat bahkan negara apabila perusahaan pertambangan hanya berfokus pada profit yang akan diperoleh. Dengan diterapkannya Sustainability Report pada perusahaan diharapkan perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan sehingga hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.

Sektor pertambangan di Indonesia juga merupakan kunci utama dari perekonomian Indonesia, dimana seluruh negara-negara mempunyai hubungan dengan pertambangan seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, pasir besi, bijih timah, bijih tembaga, bijih emas, bijih nikel, mineral dan masih banyak lagi sumber pertambangan yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah yang menjadikan Indonesia sebagai tumpu bagi roda pertambangan dari seluruh negara di dunia. (Hartriani, 2017) menyatakan bahwa pada tahun 2016, sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (BNBP) sumber daya alam. Sektor pertambangan khususnya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara menyumbang sebesar Rp 90 Triliun atau 95% dari pendapatan hasil dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sektor pertambangan juga menghasilkan pendapatan terbesar pada kegiatan ekspor, pertambangan juga memberikan kontribusi sebesar 4,70% untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019. Melihat keuntungan yang didapatkan perusahaan pertambangan semakin mumpuni banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meraih profit sebesar-besarnya, tidak lupa juga banyak investor yang semakin tertarik untuk menanamkan uangnya pada sektor pertambangan. Semakin banyaknya perusahaan pertambangan yang berkembang di Indonesia tentunya juga akan memiliki dampak yang lebih besar pada lingkungan sekitar.

Tujuan utama seseorang dalam mendirikan perusahaan yaitu untuk memperoleh income/laba yang sebanyak-banyaknya dengan harapan jangka panjang perusahaan dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era 4.0 ini persaingan antar perusahaan semakin ketat baik dalam perkembangan teknologi modern dan sistem jaringan yang sudah terintegrasi (Akmal, 2019). Hal ini yang akan mendorong suatu perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya. Namun, sering kali masih banyak perusahaan yang mengabaikan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, selain mewujudkan cita-cita perusahaan yaitu mendapatkan laba yang

sebanyak-banyaknya perusahaan juga harus bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Menurut Global Reporting Initiative (GRI) *Sustainability Report* (SR) atau biasa disebut dengan laporan keberlanjutan perusahaan merupakan praktek pengukuran, pengungkapan, serta upaya akuntabilitas dari kinerja suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan serta diperuntukkan perusahaan dalam membangun citra yang positif di masyarakat. Laporan perusahaan tidak hanya berisi mengenai laporan keuangan perusahaan saja namun ada juga laporan terhadap aktivitas lingkungan maupun sosial yang dilakukan perusahaan yaitu *sustainability report*. *Sustainability report* ini merupakan sumber informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan perusahaan tersebut.

Di Indonesia Pengungkapan *Sustainability report* sifatnya masih bersifat *voluntary* dan *mandatory* dimana telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 peraturan ini berisi himbauan kepada perusahaan agar perusahaan diwajibkan untuk membuat *Sustainability Report* serta Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan ini berisi aktivitas ekonomi, aktivitas lingkungan serta aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan *Sustainability Report* ini merupakan laporan yang bersifat sukarela (Romero et al., 2019), karena sustainability report ini bersifat sukarela masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan sustainability report pada laporan perusahaan tahunan, namun pada setiap tahunnya pengungkapan Sustainability Report ini akan bertambah.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 23 April 2019 survei yang dilakukan oleh Global Reporting Initiatives dan Bursa Efek Indonesia membuktikan bahwa dari total perusahaan sebanyak 629 di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya sebanyak 110 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dalam laporan tahunan perusahaan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa *sustainability report* bukanlah hal yang harus diprioritaskan oleh perusahaan (Setiani dan Sinaga, 2021)



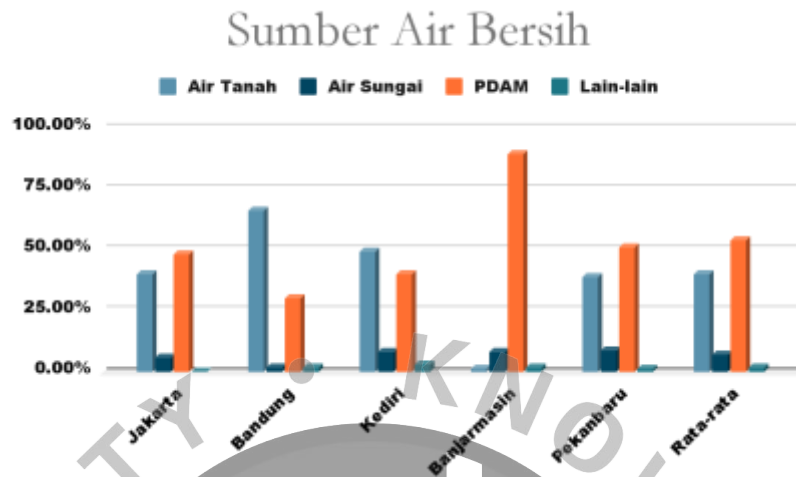
Equation 1 Grafik Jumlah Emiten yang Menerbitkan Sustainability Berdasarkan Sektor

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

Menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 perusahaan pertambangan yang sudah menerbitkan *sustainability report* masih berada dibawah sektor keuangan dengan posisi kedua dengan posisi terakhir dengan tidak adanya pengungkapan *sustainability report* pada sektor perdagangan, jasa dan investigasi. *Sustainability report* pada perusahaan pertambangan sudah seharusnya

ditingkatkan karena sektor pertambangan mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan sektor lain. Sektor pertambangan ini dampaknya sangat besar bagi masyarakat, bahan yang diambil dan dibutuhkan dari alam oleh sektor pertambangan tidaklah sedikit, hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada limbah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan harus memperdulikan lingkungan sekitar dan bertanggung jawab sosial kepada lingkungan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa hanya beberapa industri di Indonesia yang mengungkapkan *sustainability report*, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*.

Berdasarkan survei Walhi menyatakan bahwa kondisi lingkungan Indonesia dalam bahaya dalam survei “Status Lingkungan Hidup Indonesia dalam Opini Publik” yang dirilis pada tahun 2014. Dari hasil penelitian tersebut masyarakat menilai kondisi air, sungai, hingga udara di daerah-daerah yang sudah mengkhawatirkan sementara penanganan yang dilakukan belum maksimal. Survei Walhi tersebut dilakukan di wilayah Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Banjarmasin dan Kendari pada awal tahun 2014 dengan jumlah responden sebanyak 1.920. Dari hasil survei yang dilakukan, masyarakat mengatakan kondisi air tanah di daerah Jakarta, Bandung, Pekanbaru dan Kendari tergolong masih cukup baik, namun sudah berbau, keruh dan kotor, serta air yang cukup tinggi naik ke permukiman. Sedangkan, di Banjarmasin mayoritas responden mengatakan air tanah sudah berbau, kotor dan keruh. Pada kualitas udara, masyarakat menilai sebagian besar dalam kondisi yang buruk atau sangat buruk yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, pabrik maupun kebakaran hutan dan lahan.



Equation 2

Sumber : Survei Walhi Tahun 2014

Kasus Pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan salah satunya berada di Sungai Malinau di Kalimantan Utara. Pada 14 Agustus 2022 Sungai Malinau dilaporkan tercemar oleh limbah beracun, sehingga menyebabkan air sungai Malinau menjadi keruh berwarna kecoklatan, berlumpur, meluap hingga ke perkebunan warga serta memutus akses jalan yang sehari-hari dilalui oleh warga sekitar yaitu akses jalan penghubung Desa Langap dan Desa Loreh. Pencemaran sungai ini diduga terjadi karena PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang bergerak pada industri pertambangan. Penampungan yang dimiliki oleh PT. Kayan Putra Utama Coal diduga jebol sehingga mencemari sungai Malinau. Kasus pencemaran Sungai Malinau ini juga berdampak pada pasokan air bersih, warga sekitar Desa Malinau Hulu, Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinau Hilir dan Desa Pelita Kanaan di Kecamatan Malinau Barat terganggu, kasus pencemaran di Sungai Malinau ini bukan pertama kali yang terjadi. Sebelumnya pada 10 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan sanksi dalam SK No. 660.5/K/86/2021 yang berisi perintah kepada perusahaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meminta perusahaan melakukan perbaikan tanggul,

penimbunan tanah, melibatkan tenaga ahli untuk mengatasi limbah yang tercemar, mengganti ikan-ikan yang mati, membuat penanganan tanggul jebol.

Menurut catatan, Pencemaran Sungai Malinau oleh aktivitas tambang yang berada di sekitar hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai Malinau sudah berkali-kali terjadi pada awalnya tahun 2010, 2011, 2012, 2017, 2021 hingga yang terakhir kali terjadi pada tahun 2022 pada bulan Agustus. Pada tahun 2017 tanggul kolam pengendapan di Pit Betung milik perusahaan PT Baradinamika Muda Sukses juga mengalami kejadian yang sama yaitu kolam pengendapannya jebol sehingga mengakibatkan pencemaran di Sungai Malinau di lokasi yang berdekatan dengan kolam pengendapan milik PT Kayan Putra Utama Coal.

Berdasarkan hasil uji lab yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang disampaikan kepada Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Utara mengenai kasus pencemaran lingkungan melalui Surat Hasil Uji Sampel Sungai Malinau Nomor : S.447/HUMAS/PIIP/HMS.3/10/2021 menyatakan terdapat pengukuran yang melebihi Baku Mutu Air (BMA) kelas 1 PP 82 Tahun 2001, yaitu BOD, COD, PO₄, NO₃, NO₂, fluoride, minyak, lemak, MBAS, CaCO₃ serta phenol.

Kasus pencemaran ini diperkirakan akan terus terjadi hal ini dikarenakan karena terdapat lima perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan tersebut lokasinya berada disekitar Sungai Malinau, perusahaan tersebut yaitu PT Artha Marth Naha Kramo (AMNK), PT Amarta Teknik Indonesia (ATI), PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), PT Baradinamika Mudasukses (BM) serta PT Mitrabara Adiperdana (MA).

Beberapa fenomena mengenai kerusakan lingkungan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kurangnya perhatian perusahaan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial dilingkungan sekitar perusahaan tersebut berada. Hal ini yang memicu terjadinya dorongan dari berbagai pihak kepada perusahaan yang tidak

memperdulikan lingkungan maupun tidak bertanggung jawab sosial agar melakukan kepedulian terhadap lingkungan dan bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Informasi yang diungkapkan melalui laporan Sustainability Reporting oleh perusahaan secara transparan akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan aktivitasnya serta mengetahui dampak apa saja yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar perusahaan.



Berdasarkan data dari awal tahun 2006 hingga tahun 2015 semakin banyak perusahaan yang telah mempublikasikan Sustainability Report kepada public. Data ini merupakan data yang diperoleh dari Global Reporting Initiatives (GRI) yang diperoleh pada bulan Februari tahun 2016. Dari data tersebut telah tercatat sebanyak 85 perusahaan yang mempublikasikan pengungkapan *Sustainability Report*. Dilihat dari tren positif pada pengungkapan *Sustainability Report* ini selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 ada sebanyak 63 perusahaan yang mengungkapkan *Sustainability Report*.

Corporate Governance menurut Cadbury Committee dalam Cadbury Report pada tahun 1992 merupakan sebuah sistem yang mempunyai fungsi sebagai arahan dan alat pengendalian yang digunakan oleh perusahaan dalam usaha perusahaan untuk mencapai cita-citanya. Tujuan dari adanya *corporate governance* pada perusahaan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dari para pemangku kepentingan. Tidak ada peraturan mengenai *Good Corporate Governance* secara langsung, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Namun, prinsip GCG yang diuraikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang secara tersirat ada dalam UU Perseroan Terbatas dan terdapat pada website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu, 1. Keadilan (*fairness*), 2. Transparansi (*transparency*), 3. Akuntabilitas (*accountability*), 4. Pertanggungjawaban (*responsibility*).

PT. Kaltim Coal (KPC) adalah perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan batu bara. PT Kaltim Coal juga merupakan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. PT Kaltim Coal ini mengungkapkan *sustainability report* perusahaan kepada publik secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Konsistensi dari perusahaan PT Kaltim Coal ini membuat perusahaan masuk kedalam daftar Indonesia *Sustainability Reporting Award (ISRA)* 2016 yang diadakan oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*. Dalam acara *Sustainability Reporting Award (ISRA)* 2015 PT Kaltim Coal menjadi juara atas kategori pertambangan logam dan mineral pada tahun 2015, serta pada acara *Sustainability Reporting Award (ISRA)* 2016 PT Kaltim Coal meraih juara satu dalam kategori yang sama. Hal ini membuktikan bahwa konsistensi PT Kaltim Coal tersebut dapat membawa perusahaan memenangkan *Sustainability Reporting Award (ISRA)* dua tahun berturut-berturut, selain itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan

peringkat hijau dalam upaya perusahaan untuk peduli kepada lingkungan serta bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. PT Kaltim Coal tentunya berhasil mencuri perhatian dari para pemangku kepentingan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik akan mengungkapkan *sustainability report* kepada publik. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip dari *corporate governance* akan meningkatkan nilai perusahaan dimata para pemangku kepentingan.

No.	Country	Total
1.	Thailand	97
2.	Indonesia	85
3.	Malaysia	59
4.	Singapore	54
5.	Philippines	30
6.	Vietnam	12
7.	Cambodia	1

Table 1 Perbandingan Jumlah Pengungkapan Sustainability Report di Dunia

Sumber Survei GRI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Reporting Initiatives (GRI), Indonesia menempati jumlah pengungkapan *sustainability report* kedua sebanyak 85 perusahaan setelah Thailand sebanyak 97 perusahaan. Berdasarkan data tersebut baru 7 negara yang mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara lain belum banyak yang mengungkapkan *sustainability report*. *Sustainability Report* menjadi tantangan utama bagi sebuah perusahaan untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan serta bertanggung jawab

sosial terhadap masyarakat disekitar perusahaan itu berdiri. Alasan mengapa *Sustainability Report* ini belum banyak yang mengungkapkan selain dari biaya yang cukup mahal, *sustainability report* ini juga belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*. Perusahaan yang tidak transparan dalam mengungkapkan kegiatan perusahaannya dan tidak memiliki komitmen sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab menjadi perusahaan yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Melalui *Sustainability report*, perusahaan akan didorong mengungkapkan aktivitas yang dilakukan perusahaan secara transparan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan (Bukhori dan Sopian, 2017).

Corporate Governance sudah seharusnya diterapkan pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. *Corporate Governance* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam mengupayakan perusahaan untuk mendapatkan nilai perusahaan dari para pemangku kepentingan. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan sangatlah penting dalam jangka panjang dengan mengutamakan hubungan antara stakeholders dan shareholders dengan perusahaan. Dengan menerapkan *corporate governance* ini nilai perusahaan tentunya juga akan bertambah. Akhir-akhir ini penerapan *good corporate governance* pada perusahaan cukup menjadi perhatian perusahaan untuk dijadikan strategi dalam mencapai cita-cita perusahaan.

Perusahaan dengan *Corporate Governance* yang baik sudah seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik sehingga, perusahaan yang memiliki pengawasan yang baik dapat beroperasi secara lebih efisien dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Sofiamira dan Haryono, 2017). Para pemangku kepentingan tentunya mengharapkan perusahaan menerapkan *corporate governance* yang baik hal ini juga akan berpengaruh pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik diharapkan juga mampu menjaga kesehatan lingkungan dan bertanggung jawab sosial (Tobing et al., 2019). Dengan

penerapan *corporate governance* perusahaan sudah mendapat nilai tambah dari para pemangku kepentingan dan keberlanjutan perusahaan juga tentunya lebih terjamin, sehingga diharapkan dengan menerapkan *corporate governance* perusahaan akan mengungkapkan *sustainability report* pada laporan tahunan perusahaan.

Studi sebelumnya pada penelitian (Ardiani et al., 2022) menggunakan proksi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan direksi wanita tidak mempunyai pengaruh terhadap *sustainability report* dan (Barung et al., 2018) juga mengungkapkan bahwa dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ardiani et al., 2022) *corporate governance* menggunakan proksi komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *sustainability report* dan pada penelitian (Situmorang dan Hadiprajitno, 2016) menyatakan bahwa direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kualitas audit merupakan penilaian baik atau tidaknya cara auditor dalam mendeteksi fenomena yang terjadi pada sebuah perusahaan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan kemudian auditor mengkomunikasikan hasil temuannya kepada perusahaan. Perusahaan kemudian akan mengungkapkan laporan tahunan kepada publik secara transparan. Laporan tahunan perusahaan diungkapkan kepada publik untuk mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tentunya mengharapkan laporan tahunan yang terpercaya, sehingga para pemangku kepentingan menyerahkan kepercayaan kepada auditor dalam memeriksa laporan tahunan. Jasa audit merupakan jasa yang digunakan sebagai *monitoring* terhadap masalah perusahaan. Auditor yang baik akan mengungkapkan masalah yang terjadi pada perusahaan secara transparan kepada pemangku kepentingan. Hal ini juga berpengaruh dengan kualitas audit, kualitas audit yang baik diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan pihak yang menggunakan laporan tahunan perusahaan (Christiani dan Nugrahanti, 2014). Akibat dari banyaknya sumber daya manusia yang

berprofesi sebagai auditor, maka tidak dapat dibantah pula apabila kualitas dari auditor tersebut berbeda-beda.

Tidak semua auditor bisa mengaudit laporan perusahaan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus bisa memilih auditor yang mampu mengungkapkan laporan perusahaan dengan baik, karena hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor digunakan oleh perusahaan untuk menyusun rencana yang akan diambil oleh perusahaan agar keberlanjutan perusahaan dapat diteruskan. Sedangkan, oleh para pemangku kepentingan hasil audit yang diungkapkan auditor digunakan untuk menilai kualitas perusahaan dan sebagai parameter dalam mengambil keputusan pemangku kepentingan. Berkualitas atau tidaknya laporan yang dikeluarkan oleh auditor ini akan mempengaruhi keputusan baik keputusan yang diambil oleh perusahaan maupun keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Di Indonesia banyak auditor yang tidak transparan dalam mengungkapkan hasil temuannya dengan tujuan melindungi perusahaan. Namun, hal ini sangat disayangkan oleh para pemangku kepentingan karena dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, para pemangku kepentingan, bahkan bagi negara. Seperti kasus KAP Ben Ardi pada tahun 2013 KAP Ardi tidak mematuhi Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melakukan audit umum atas laporan PT. Bumi Citra Permai, sehingga pada tahun 2015 KAP Ben Ardi mendapatkan sanksi selama 6 bulan. Kasus selanjutnya dilakukan oleh KAP Purwanto, KAP Suherman dan Surja, kasus ini mendapatkan sanksi denda sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 13.300.000.000 oleh regulator Amerika Serikat pada tahun 2017. KAP Purwanto, KAP Suherman dan Surja ini melakukan audit pada laporan perusahaan telekomunikasi PT Indosat, Tbk (ISAT) pada tahun 2017.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa masih banyak auditor yang mengabaikan Standar Audit (SA) dan Standar Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan tahunan perusahaan. Penemuan auditor pada laporan tahunan

perusahaan yang berkualitas yaitu apabila auditor memenuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Standar Auditing (SA) atau Standar Akuntan Publik (SPAP) dalam mengungkapkan hasil temuannya. Literatur penelitian sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Nutriastuti dan Annisa, 2020) mengatakan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap *sustainability reporting* bahwa tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iswandika et al., 2014) yang mengatakan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *sustainability report*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu proses yang dapat memberikan nilai berupa angka atau label dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan atau yang sudah sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh seluruh pihak (Hasanah dan Putri, 2018) Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang memadai akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam kebutuhan lain seperti kegiatan sosial (Dewi dan Pitriasari, 2019). Perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi juga akan lebih memungkinkan perusahaan akan mengungkapkan *sustainability report*.

Penggunaan variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dikarenakan banyaknya pengaruh variabel independen serta keterkaitan ukuran perusahaan sebagai variabel yang memoderasi dalam pengungkapan *sustainability report*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tobing et al., 2019) dan (Barung et al., 2018) mengungkapkan adanya pengaruh dari ukuran perusahaan yang signifikan terhadap *sustainability report*. (Madona dan Khafid, 2020) mengungkapkan tidak adanya pengaruh dari ukuran perusahaan yang memoderasi *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*.

Dalam penelitian sebelumnya baik pengaruh *corporate governance* maupun pengaruh kualitas audit terhadap *sustainability report* tidak menghasilkan

ketidakkonsistenan dengan hasil yang berbeda dengan *corporate governance* diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit dan direksi wanita serta kualitas audit hal ini yang mendorong peneliti dalam membuktikan pengaruh *corporate governance* maupun pengaruh kualitas audit terhadap *sustainability report* dengan menggunakan variabel moderasi dengan ukuran perusahaan dan variabel kontrol menggunakan ROA dan *leverage*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Ong dan Djajadikerta, 2020) dengan hasil penelitian tersebut bahwa *Corporate Governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ekonomi, lingkungan dan sosial yang disediakan oleh perusahaan di industri sumber daya Australia. Perbedaan penelitian ini dari penelitian (Ong dan Djajadikerta, 2020) yaitu penambahan variabel Independen yaitu Kualitas audit karena Kualitas Audit ini sangat diperlukan untuk mengungkapkan Sustainability Report dengan transparan dan netral untuk mengambil kepercayaan dari para pemangku kepentingan, jika *sustainability report* diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dari pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menggunakan variabel moderasi ukuran perusahaan dikarenakan banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* karena atas pengaruhnya variabel independen dan keterlibatan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil variabel moderasi ukuran perusahaan agar mengetahui ukuran perusahaan akan memperlemah atau memperkuat *Corporate Governance* dan Kualitas Audit dalam mengungkapkan *sustainability report* perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah-masalah yang dirasakan pada masyarakat, identifikasi masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah yang telah menjadi kekhawatiran pada masyarakat. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia bahkan dunia menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat dunia saat ini.
2. Banyaknya perusahaan di Indonesia khususnya pertambangan yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Hanya sedikit perusahaan di dunia khususnya Indonesia yang mengungkapkan *sustainability report* kepada publik secara transparan.
4. Banyaknya perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dimana salah satunya perusahaan seharusnya transparan dalam mengungkapkan *sustainability report* dan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*.
5. Banyaknya auditor yang mengaudit laporan perusahaan tidak sesuai dengan standar audit yang ada di Indonesia

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk dapat berfokus pada penelitian yang akan dilakukan agar mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dengan itu, dalam penelitian ini dapat menyusun lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain :

1. Luas lingkup dalam penelitian ini hanya meliputi *Corporate Governance*, Kualitas Audit, *Sustainability Report* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
2. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data pada perusahaan yang mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating periode 2017-2021.
3. Pada penelitian ini hanya berfokus untuk membahas masalah yang berkaitan dengan *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit pada *Sustainability Report* serta keterkaitan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan.
4. Pada Penelitian ini *Corporate Governance* menggunakan dua proksi yang mencerminkan *Good Corporate Governance* yaitu proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Sustainability Report*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Sustainability Report*?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Sustainability Report*?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Sustainability Report*?
5. Apakah Komite Audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Sustainability Report*?

6. Apakah Kualitas Audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Sustainability Report?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Sustainability Report*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Sustainability Report*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *Sustainability Report*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan terhadap *Sustainability Report*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan terhadap *Sustainability Report*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan terhadap Sustainability Report

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengharapkan agar dapat memberikan peranan dan banyak manfaat untuk berbagai pihak – pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai tambahan dalam pengetahuan mengenai *Corporate Governance* dan Kualitas Audit pada *Sustainability Report* dengan menggunakan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan pada perusahaan – perusahaan yang mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Dengan terbuatnya penelitian ini, dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam keahlian mengenai *corporate governance* dan kualitas audit terutama mengenai pengungkapan *Sustainability Report* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat untuk bisa memberikan bukti pengaruh *corporate governance* dan kualitas audit terhadap *sustainability report* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sehingga perusahaan juga akan mendapatkan tambahan informasi mengenai *sustainability report*. Perusahaan juga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dengan cara memperdulikan lingkungan dan bertanggung jawab sosial kepada lingkungan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan bisa lebih peduli dengan lingkungan dengan mengungkapkan *Sustainability Report* pada laporan tahunan perusahaan secara transparan kepada para pemangku kepentingan.

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini menjadi tinjauan kembali dalam mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai *sustainability report*, dan menjadi tinjauan kembali bagi pemerintah untuk mewajibkan pengungkapan *sustainability report* kepada perusahaan di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini sistematika penulisan ditujukan sebagai penjelasan dari materi, maka pada penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang yang menjadikan dasar penelitian ini. Komponen lainnya yang ada pada bab ini yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II berisi teori dan penjelasan yang menguraikan teori – teori dan pengertian dasar yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Menggunakan data – data pada penelitian, menggunakan variabel – variabel yang digunakan, definisi operasional dari variabel penelitian, sampel penelitian, serta jenis dan sumber data dan juga metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, serta interpretasi dan argumentasi dari hasil pada penelitian ini.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang dimana pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang menyajikan secara singkat apa yang diperoleh dalam bab sebelumnya yaitu pembahasan, keterbatasan yang berisi tentang kelemahan dalam penelitian ini, serta saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.